

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan kesehatan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional bertujuan untuk tercapainya kemampuan hidup lebih sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Upaya-upaya kesehatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan tersebut antara lain dengan pendekatan pemeliharaan peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan (Siregar, 2004).

Dalam penyelenggaraan berbagai upaya kesehatan ini apotek merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan dalam membantu mewujudkan tercapainya derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Selain itu juga sebagai salah satu tempat pengabdian dan praktek profesi apoteker dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian (Anonim, 2010)

Pelayanan kefarmasian meliputi pengelolaan sumber daya (SDM, sarana prasarana, sediaan farmasi, dan perbekalan kesehatan serta administrasi) dan pelayanan farmasi klinik (penerimaan resep, peracikan obat, penyerahan obat, informasi obat dan pencatatan/penyimpanan resep) dengan memanfaatkan tenaga, dana, sarana, prasarana, dan metode tatalaksana yang sesuai dalam upaya mencapai tujuan yang ditetapkan (Anonim, 2006).

Pelayanan kefarmasian pada saat ini telah bergeser orientasinya dari obat ke pasien yang mengacu kepada pelayanan kefarmasian (*pharmaceutical care*). Kegiatan kefarmasian yang semula hanya berfokus pada pengelolaan obat sebagai komoditi menjadi pelayanan yang komprehensif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dari pasien. Sebagai konsekuensi perubahan orientasi tersebut, apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku untuk dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut antara lain adalah melaksanakan pemberian informasi, monitoring penggunaan obat, dan mengetahui tujuan akhirnya sesuai harapan dan terdokumentasi dengan baik. Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan dalam proses pelayanan. Oleh sebab itu apoteker dalam menjalankan praktek harus sesuai standar yang ada untuk menghindari terjadinya hal tersebut. Apoteker harus mampu bekerja sama dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional (Anonim, 2006).

Perkembangan apotek ini sangat ditentukan oleh pengelolaan sumber daya dan pelayanan di apotek tersebut. Oleh sebab itu, standar pelayanan farmasi sangat diperlukan dalam menjalankan suatu apotek. Karena pengelolaan sumber daya dan pelayanan merupakan salah satu indikator dalam tercapainya derajat kesehatan masyarakat. Jika suatu apotek tidak menggunakan standar pelayanan farmasi dalam menjalankan apotek maka kurang tercapai pula derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Karena pelayanan farmasi adalah bentuk pelayanan dan tanggung jawab langsung profesi apoteker dalam pekerjaan kefarmasian untuk meningkatkan kualitas hidup pasien/masyarakat (Hartini dan Sulasmono, 2006).

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian di apotek, pemerintah telah menetapkan standar pelayanan kefarmasian yang berasaskan *pharmaceutical care*. Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No1027/MENKES/SK/IX/2004 Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek meliputi pengelolaan sumber daya dan pelayanan (Anonim, 2004). Salah satu penelitian yang dilaksanakan di Kota Medan tahun 2008 tentang Penerapan Standar kefarmasian, termasuk kategori kurang (Ginting, 2008).

Berdasarkan gambaran tersebut perlu dilakukan penelitian untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian di apotek RSUD Toto Kabupaten Bone Bolango. Adapun dipilihnya RSUD Toto dengan pertimbangan karena merupakan salah satu daerah yang padat penduduk dengan jumlah apotek yang sedikit dan merupakan salah satu dari dua buah rumah sakit yang dimiliki pemerintah Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo, yang memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat di wilayah Kabupaten Bone Bolango bahkan dari luar Provinsi Gorontalo serta jumlah pengunjung yg banyak yaitu pada bulan januari sampai dengan maret 2012 sejumlah 1.684 orang untuk pasien umum rawat jalan dan pasien umum rawat inap sejumlah 207 orang.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah apotek di RSUD Toto Kabupaten Bone Bolango telah mengacu pada standar pelayanan kefarmasian di apotek menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1027/Menkes/SK/IX/2004?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek RSUD Toto Kabupaten Bone Bolango pada Tahun 2012

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

#### **1.4.1. Bagi Peneliti**

Menambah pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti tentang pelayanan kefarmasian di apotek.

#### **1.4.2. Bagi pihak RSUD Toto**

Memberikan masukan kepada pihak RSUD Toto Kabupaten Bone Bolango untuk bisa memperbaiki dan lebih mengontrol kinerja pelayanan kefarmasian pada khususnya agar dapat memenuhi standar pelayanan kefarmasian yang ada.

#### **1.4.3. Bagi Pihak Lain**

Sebagai sumbangan ilmu pengetahuan, dan bisa dipakai oleh peneliti lainnya untuk dapat melanjutkan atau melakukan penelitian yang lebih mendalam.